

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afandi, Fachrizal, *Modernisasi Peradilan Pidana: Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Setara Press, Jakarta, 2022.
- Alkostar, Artidjo, *Dimensi Sosiologis Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Setara Press, Jakarta, 2018.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Effendy, Marwan, *Tipikor: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016.
- Mansyur, Ridwan, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017.

Radbruch, Gustav, *Filsafat Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, 1970.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 77–82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sumber-Sumber lainnya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015* mengenai Kewajiban Penyerahan SPDP.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 113/Pid.Pra.Pra/2024/PN.Jkt.Sel*.

Fitriani, Dian, "Optimalisasi Lembaga Praperadilan sebagai Control Mechanism terhadap Upaya Paksa Penyidik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51,

No. 2, 2021.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM*, Jakarta, 2019.

Rasyid, M. Agus, "Tinjauan Yuridis Alat Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Riset Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Rochaeti, Nur, "Penegakan Hukum Pidana dalam Perwujudan Nilai Keadilan dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015.

Rustamaji, Muhammad, "Eksistensi Lembaga Praperadilan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 4, No. 1, 2018.

